



Published every April, August and December

JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN

ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>



Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa

Umi Pratiwi¹, Permata Ulfah²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSOED

Abstract. *This study aims to determine whether the factors understanding the Government Regulation on Village Fund Management, Implementation of good governance government, the quality of human resources affect the performance of village government officials in the accountability of village funds. The study was carried out in villages in 3 Sub-districts in Banyumas District namely Sumbang, Patikraja and Rawalo. Data were collected through questionnaires sent to respondents who served as village heads / village secretaries / treasurers. Respondents numbered 38 people representing 38 villages in 3 Subdistricts of Banyumas Regency. Research results indicate that the factor of understanding of the Government Regulation on Village Fund Management does not affect the performance of the village government apparatus in the accountability of village funds. Variables in the application of good governance government principles and the quality of human resources influence the performance of village government officials in village fund accountability*

Keywords: *Understanding, good governance government, quality of human resources, performance, accountability of village funds*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor pemahaman tentang Peraturan Pemerintah Pengelolaan Dana Desa, Penerapan *good governance government*, kualitas sumber daya manusia mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah desa dalam akuntabilitas dana desa. Penelitian dilaksanakan di desa pada 3 Kecamatan di Kabupaten Banyumas yaitu Kecamatan Sumbang, Kecamatan Patikraja, dan Kecamatan Rawalo. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dikirim kepada responden yang menjabat kepala desa/sekretaris/bendahara desa. Responden berjumlah 38 orang yg mewakili 38 desa di 3 Kecamatan Kabupaten Banyumas. Data diolah menggunakan analisa regresi linear berganda.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor pemahaman tentang Peraturan Pemerintah Pengelolaan Dana Desa tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam akuntabilitas dana desa. Variabel penerapan prinsip-prinsip *good governance government* dan kualitas sumber daya manusia mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah desa dalam akuntabilitas dana desa.

Kata Kunci: Pemahaman, *good governance government*, kualitas SDM, kinerja, akuntabilitas dana desa

Corresponding author. Email : umipratiwi.feunsoed@gmail.com

How to cite this article. Umi Pratiwi, Permata Ulfah. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 6 (3), 429-440. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/4670>

History of article. Received: September 2018, Revision: November 2018, Published: December 2018

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v4i3.4670

Copyright©2016. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Kinerja aparatur pemerintah desa merupakan satu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, dimana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good government governance*, karena mendekatkan negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah lokal. *Good Governance* (Aliyah, 2012) sering diartikan sebagai tata kepemimpinan yang baik, dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good government governance*.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006). Dengan digelontorkannya Alokasi Dana Desa dari APBN yang cukup besar, maka pemerintah desa sebagai lembaga publik semakin dituntut atas akuntabilitasnya dalam pengelolaan dana desa tersebut. Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan dana desa adalah penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan transparansi anggaran (Wahyuni dkk (2014), Fatmawati (2014)),

Kebijakan pemberian dan penentuan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan sejak tahun 2006, sudah adil dan merata tetapi tidak mencerminkan azas dinamis, karena besaran Total ADD Kabupaten dan besaran

ADD yang diterima oleh masing-masing desa khususnya sejak tahun 2008 sampai dengan 2011 relatif tetap dan tidak ada perubahan (dinamis), walaupun sumber dana ADD dari dana perimbangan semakin menurun jumlahnya di Kabupaten Banyumas, bila semula hanya m endapat alokasi dana desa Rp 41 miliar, setelah dilakukan perubahan mengalami peningkatan menjadi Rp 89 miliar."Dana sebesar itu, nantinya dibagi untuk 301 desa yang ada di Kabupaten Banyumas," jelas Kasubag Bina Desa Bagian pemerintah Pemkab Banyumas Parwoto.

Pengelolaan ADD yang efektif menjadi salah satu kriteria penilaian kinerja aparatur pemerintah desa. Salah satu faktor yang mempengaruhi Kinerja aparatur pemerintah dalam hal akuntabilitas dana desa adalah pemahaman Peraturan Pemerintah PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dari pemahaman pegawai pemerintahan memberikan dampak terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Government Governance* yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajiban sudah tertuang dalam 9 program Reformasi Birokrasi Nasional antara lain: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas. Berdasarkan kesimpulan penelitian terdahulu dan pencapaian program diatas, diduga bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap Kinerja.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga ikut mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah. Manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya Sudiarianti dkk (2015). Untuk dapat menghasilkan kinerja yang berkualitas dan baik maka diperlukan

kapasitas sumber daya manusia yang memadai agar mampu menjalankan sistem dengan baik. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah aparatur desa, di mana mereka inilah yang menjalankan roda kegiatan di desa termasuk juga dalam pengelolaan keuangan. Jika desa memiliki aparat yang berkualitas dan memiliki keahlian akuntansi yang baik, akan lebih mudah bagi mereka untuk melaksanakan asas akuntabilitas. Sebaliknya, jika aparat yang dimiliki desa tidak berkualitas maka akan sulit bagi desa untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Mada *et al.* (2017), Rahmawati (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Sedangkan menurut Widyatama *et al.* (2017) kompetensi SDM tidak berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Temuan dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi desa atau pihak pengambil kebijakan publik dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang diduga yaitu pemahaman tentang Peraturan Pemerintah Pengelolaan Dana Desa, prinsip-prinsip *good government governance*, kualitas sumber daya manusia mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah desa dalam akuntabilitas dana desa.

KAJIAN LITERATUR

Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam PP No 60 tahun 2014, Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Perhitungan Dana Desa setiap kabupaten/kota

dihitung berdasarkan jumlah desa yang dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota

Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Kinerja merupakan sebuah olahan hasil pekerjaan kita di sebuah organisasi yang didasarkan pada kebijakan perusahaan dan berorientasi pada tujuan organisasi. Penilaian kinerja (*performance appraisal*) merupakan faktor utama dalam mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien serta berfungsi dalam membantu manajer menilai capaian strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Manajemen dapat berarti pencapaian tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial antara lain (Mahoney, 1963) dalam Ambarwati dkk, 2015 yaitu meliputi perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staff, negoisasi dan perwakilan. Kinerja

Pemahaman tentang Peraturan Pemerintah Pengelolaan Dana Desa

Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015). Sedangkan menurut Soekidjo (2007) memahami adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 digunakan sebagai kriteria dalam menilai informasi yang disajikan, dengan demikian PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan pemeriksaan. Pemahaman Permendagri No. 113 ini menyangkut pemahaman : Rencana Keuangan Desa, Laporan Realisasi Anggaran Desa, Laporan Keuangan Desa, Asset Desa dan Kewajiban Desa. Pemahaman pegawai pemerintahan memberikan dampak terhadap

penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar.

Penerapan *good government governance*

Konsep *governance* dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti *corporate governance*, *international governance*, *national governance*, *government governance*, dan *local governance*. *Good governance* dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab (*accountable*) pada publiknya. *Good governance* adalah, penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergiaan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain (*state, private sector and society*)(Sari, 2013). Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Dalam sebuah penelitian disebutkan juga bahwa empat faktor *good governance government* yang meliputi akuntabilitas, transparansi, keadilan dan partisipasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai.(Ambarwati dkk, 2015).

Kualitas sumber daya manusia

Elemen yang terpenting dalam suatu organisasi adalah sumber daya manusia, karena manusia adalah yang menjalankan program dan mengatur serta melakukan semua kegiatan dan aktivitas suatu entitas ekonomi. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari pegawai menjalankan proses pemeriksaan yang dilihat dari kemahiran seseorang, latar belakang pendidikan, persyaratan yang harus diikuti untuk dapat menjalankan proses pemeriksaan, pelatihan-pelatihan, dan sosialisasi peraturan yang mengalami perubahan (Sari dkk, 2013).

Menurut Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsidapat dilihat dari tingkat tanggung

jawab dan kualitas sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan yang merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Sedangkan kualitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas (Mendey, 2015). Penelitian Bounder, dkk (2011), Sudiarianti (2015), Amran (2009), Sari, dkk (2013)serta Farid dan Aryani (2015) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_{a1} :Pemahaman Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam akuntabilitas dana desa.

H_{a2} :penerapan prinsip-prinsip *good governance government* berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam akuntabilitas dana desa

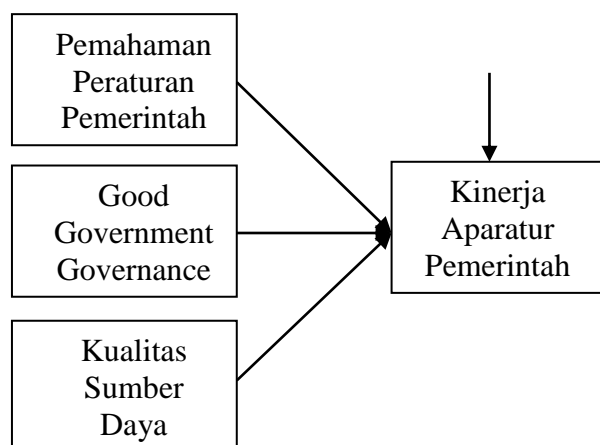
H_{a3} :kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam akuntabilitas dana desa

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan survei. Desain survei adalah prosedur dalam penelitian kuantitatif dimana peneliti mengatur pemeriksaan sampel atau untuk seluruh populasi untuk menggambarkan sikap, pendapat, perilaku atau karakteristik populasi (Creswell, 2012). Penelitian ini dilakukan pada Desa-desa di Kecamatan Sumbang, Kecamatan Patikraja dan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat pemerintahan desa di 19 desa di Kecamatan Sumbang, 12 desa di Kecamatan Patikraja dan 6 desa di Kecamatan Rawalo yang memangku jabatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pimer. Data primer berupa keterangan yang memberikan gambaran atas suatu keadaan, cara

memperolehnya dengan menyebarkan kuesioner kepada aparat pemerintah desa yang terkait langsung dengan Akuntabilitas Dana Desa.



Gambar 1. Model Penelitian yang dikembangkan

Variabel Kinerja aparat pemerintah desa adalah tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu pelaksanaan kegiatan. Kinerja manajerial diukur melalui instrumen kuesioner yang berdasar pada penelitian Mahoney, dkk (1963) dalam Indriasari dan Nahartyo (2008) yang terdiri dari delapan item pertanyaan menggunakan skala likert 1-5. Adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pemerintah Pengelolaan Keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada PERMENDAGRINo. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Variabel ini diukur 5 item dengan skala likert 1-5. Variabel penerapan prinsip-prinsip *Good Government Governance* menggunakan indikator pertanyaan sebagai berikut: a). transparansi, b) kemandirian, c) akuntabilitas, d). pertanggungjawaban dan e) kewajaran dengan masing-masing indikator 5 pertanyaan yang diadopsi dari penelitian (Ambarwati dkk, 2015). terdiri dari 25 butir pertanyaan dengan menggunakan skala *likert* 1-5. Kualitas sumber daya manusia

merupakan kemampuan pegawai dalam menjalankan tugasnya sehingga diperlukan pengembangan agar mencapai kinerja yang memuaskan. Untuk mengukur kualitas sumber daya manusia digunakan instrumen pernyataan Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004). Kuesioner variabel Kualitas SDM terdiri dari 7 butir pertanyaan.

Instrumen Penelitian berupa kuesioner diuji validitas dan reliabilitas kepada 38 responden dan menunjukkan semua pertanyaan dalam variabel yg diukur dinyatakan valid karena tidak ada satupun nilai yang berada dibawah r_{tabel} sebesar 0,4762. Hasil uji , reliabilitas diketahui bahwa nilai koefisien *Cronbach-Alpha* untuk setiap instrumen penelitian lebih besar dari 0,60. Kesimpulan yang dapat diambil adalah seluruh instrumen pada penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik sebelum dilakukan uji regresi linear berganda. yakni uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas.. Suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* pada diketahui nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0,200 sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas , nilai VIF dari masing-masing variabel lebih kecil dari 10 dan *tolerance* > 0,1 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas bahwa nilai sig. masing-masing variabel lebih besar dari α (0,05), dengan demikian dapat dikatakan dalam regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Banyumas adalah salah satu kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dengan luas wilayah mencapai 1.329,02 km², Kabupaten Banyumas dibagi kedalam 27 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 301. Kabupaten Banyumas juga menjadi penerima bantuan pendanaan dari pusat untuk desa yang dikenal

dengan bantuan Dana Desa (DD). Terhitung mulai tahun 2015, nominal Dana Desa yang diterima selalu meningkat mulai dari Rp89 Miliar pada 2015, Rp200.450.575.000 pada tahun 2016 dan kembali meningkat menjadi Rp255.734.553.000 untuk tahun anggaran 2017. Jumlah tersebut harus dibagikan kepada 301 desa yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Peraturan mengenai dana desa di Kabupaten Banyumas diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian ini mengambil lokasi di 40 desa di 3 Kecamatan Banyumas yaitu Kecamatan Sumbang, Kecamatan Patikraja dan Kecamatan Rawalo. Kabupaten

Banyumas. Penentuan sampel diharapkan sudah mewakili daerah di wilayah Kabupaten Banyumas yakni barat, utara, timur dan selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang dikumpulkan dari jawaban responden atas kuesioner yang dibagikan. Sebanyak 40 kuesioner dibagikan kepada 40 perangkat desa di 40 desa berbeda yang dijadikan sampel. Dari jumlah tersebut hanya 38 kuesioner yang kembali.

Responden dalam penelitian ini adalah perangkat di desa yang menjabat bagian keuangan di masing-masing desa. Data dari Responden dijelaskan berdasarkan jenis kelamin, usia, lama bekerja, jenjang pendidikan disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Karakteristik Responden

No	Informasi	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki –Laki	31 orang	81,60
		Perempuan	7 orang	18,40
		Jumlah	38 orang	100,00
2	Usia	20-29 Tahun	1 orang	2,63
		30-39 Tahun	6 orang	15,79
		40-49 Tahun	20 orang	52,63
		>50 Tahun	11 orang	28,95
		Jumlah	38 orang	100,00
3	Lama Bekerja	≤ 10 Tahun	17 orang	44,74
		11-20 Tahun	16 orang	42,10
		21-30 Tahun	4 orang	10,53
		> 30 Tahun	1 orang	2,63
		Jumlah	38 orang	100,00
4	Jenjang Pendidikan	SLTP	2 orang	5,30
		SLTA	17 orang	44,70
		Diploma	7 orang	18,40
		Strata 1	12 orang	31,60
		Jumlah	38 orang	100,00

Sumber : Data Pimer diolah, 2018

Analisis Data

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai variabel penelitian berdasarkan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*) dan simpangan baku (*standar deviation*). Statistik deskriptif selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Tanggapan Responden

No		N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
1	X ₁	38	17	35	27,78947	3,84959
2	X ₂	38	81	125	102,7105	9,123501
3	X ₃	38	19	25	20,552632	1,6390071
4	Y	38	28	40	32,26316	2,321279

Sumber : Data primer diolah, 2018

Setelah data penelitian dinyatakan lolos uji asumsi klasik, selanjutnya dilakukan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen

terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2011). Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang diolah, ringkasan hasil analisis adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Nilai t_{hitung}	Nilai t_{tabel}	Sig.
Konstanta	16.610	4,289	1,672	0,000
X ₁	-0,157	-0,558	1,672	0,104
X ₂	0,125	2,482	1,672	0,018
X ₃	0,216	2,383	1,672	0,028
<i>Adj. R Square</i>	= 0,383			
F_{hitung}	= 8,661			
F_{tabel}	= 2,54			
Sig. F	= 0,00			

Sumber : Data primer diolah, 2018

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Tentang Akuntabilitas Dana Desa terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Akuntabilitas Dana Desa

Dari hasil pengujian hipotesis, terlihat secara statistik nilai sig 0,104 > 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Tentang Akuntabilitas Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Aparatur pemerintah Desa, **Hipotesis 1 ditolak**.

Jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan responden penelitian yang telah ditampilkan pada tabel 3, sebagian besar responden dalam penelitian inihanya lulusan SLTA dan bahkan masih ada beberapa yang hanya mengenyam pendidikan setingkat SLTP (6,56%). Keadaan ini tentu berkontribusi terhadap tingkat pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas dana desa dan peraturan lain. Padahal jika merujuk pada pendapat Robbins (2015), pegawai yang kompeten adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. Jenjang pendidikan SLTP dan SLTA tentu tidak bisa dikatakan relevan dengan pemahaman peraturan pemerintah

tentang pengelolaan dana desa yang merupakan bidangnya orang-orang akuntansi.

Selain latar belakang pendidikan yang kurang relevan dengan bidang pekerjaan, hasil penelitian juga menunjukkan rata-rata usia responden lebih dari 40 tahun. Usia 40 tahun tentu tidak bisa dikatakan muda dan sedikit banyak berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa. Sebagaimana dikatakan oleh Robbins (2015), bahwa pegawai tua cenderung lamban dalam bekerja dan sulit dalam mengadopsi atau menerima teknologi baru. Padahal saat ini, hampir seluruh proses pengelolaan administrasi di desa sudah menggunakan perangkat komputer. Sehingga, selain dituntut untuk memiliki pengetahuan di bidang akuntansi, perangkat desa juga dituntut untuk menguasai program-program komputer.

Pengaruh Penerapan Good Government Governance terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Akuntabilitas Dana Desa

Dari hasil pengujian hipotesis 2 secara statistik dengan nilai sig. 0,018 < 0,005. menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap Kinerja

Apaatur.pemerintah Desa. Dengan demikian **Hipotesis 2 diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Government Governance* telah meningkatkan Kinerja Aparatur. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi yang materiil dan relevan serta valid mengenai institusi. Pada Pelaksanaan untuk transparansi dilaksanakan secara baik terlihat dari jawaban responden yang berkisar menjawab cukup.

Penerapan prinsip kemandirian dalam pengelolaan anggaran yang profesional tidak banyak berbenturan dengan kepentingan dan pengaruh serta tekanan dari pihak luar, sehingga mendorong pemerintah desa memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder*. Hal ini didukung dengan peningkatan kualitas pengelola keuangan dengan diberikan diklat teknis serta bimbingan.

Sedangkan dengan akuntabilitas anggaran yang baik, maka otomatis informasi keadaan keuangan yang disajikan sudah waja dan tepat. Dengan pertanggungjawaban anggaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat memastikan pengelola keuangan disiplin dalam bekerja sehingga tidak terjadi pungutan liar atau ada yang terlibat KKN. SOP yang telah ditetapkan juga sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Penelitian ini mendukung penelitian (Ambawati dkk, 2015) menyebutkan bahwa *Good Government Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Banyumas. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa *Good Government Governance* dijadikan alat dalam upaya meningkatkan kinerja terutama di sektor publik dan penerapan prinsip-prinsip tersebut terbukti memberikan pengaruh baik. Pada penelitian (Ningsih & Indar, 2011) juga menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Government Governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi dan partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Apaatur Pemerintah Dalam Akuntablitas Dana Desa

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan variabel kualitas sumber daya manusia terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dengan nilai sig. $0,028 < 0,005$. Jika dikaitkan dengan tanggapan responden rata-rata menyatakan setuju (4,239) pada instrumen penelitian variabel ini. **Jadi Hipotesis 3 diterima**.

Secara umum, meskipun sumber daya manusia rata-rata berpendidikan SLTA tapi mereka mendapatkan pelatihan yang cukup sehingga dapat meningkatkan peanannya dalam masyaakat. Terlebih usia mereka yang masih muda. Jika menilik kondisi desa-desa di Kabupaten Banyumas berdasarkan tanggapan responden penelitian, dapat disimpulkan bahwa desa-desa sudah mempunyai kmpetensi sumber daya manusia yang cukup baik. Mayoritas dari apaatur desa-desa tersebut sudah menyusun *Standar Operational Procedure* (SOP) yang tertuang dalam Perdes, dan telah memiliki tindakan disiplin atas penyelewengan. Hal ini tentu dapat meningkatkan kemungkinan bagi desa untuk melaksanakan asas akuntabilitas dalam pelaksanaan keuangannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh, Suharto (2012), Sutaryo dan Jakawinarna (2013), Sudiarianti (2015) serta Feriwasana dan Talkah (2013) yang menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena sumber daya manusia merupakan penentu keberhasilan organisasi, jika suatu organisasi memiliki aparatur yang berkualitas maka akan meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah.

SIMPULAN

Pemahaman Peraturan Pemerintah Tentang Akuntabilitas Dana Desa terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Pemerintah Daerah senantiasa harus melakukan sosialisasi peraturan pemerintah yang berkaitan dengan akuntabilitas dana desa sehingga semakin meningkat pemahamannya. Agar kinerja aparatur desa semakin baik. Karena desa adalah lingkup kecil dalam meningkatkan kualitas kemajuan negara

Penerapan prinsip-prinsip *good government governance* berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Semakin tinggi Penerapan prinsip-prinsip *good government governance* semakin meningkatkan kinerja manajerial aparatur pemerintah desa. Penguatan penyempurnaan berkelanjutan dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Government Governance* supaya dapat meningkatkan Kinerja Aparatur Desa sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat desa tercapai.

Kualitas sumber daya manusia signifikan berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia akan semakin meningkatkan kinerja manajerial aparatur pemerintah desa. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu memperhatikan sistem lelang jabatan yang terbuka dan penerapan sistem penghargaan (*reward*) yang berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. (2004). Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah "XYZ" dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 05 No. 02.
- Aliyah, Siti dan Nahar, Aida. (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Vol. 8 No. 2, hal 97-189
- Ambarwati, W., Suyono, E., & Pratiwi, U. (2013). Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Komitmen Organisasi terhadap Aparatur Pemerintahan. *SNA 16*. Manado: www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id.
- Amran. (2009). Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Departemen Sosial Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ichsan Gorontalo*, Vol.4 No. 2 , hal. 2397-2413
- Bounder, A., Bouchard, C.-D., & Bellemare, G. (2011). Competency-Based Management-- An Integrated Approach to Human Resource Management in the Canadian Public Sector. *Public Personal Management*, Vol.40, No.1 , hal. 1-10
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research : Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research Fourth Edition*. Boston: Pearson Education, Inc
- Farid, Muhammad dan Y Anni Aryani. (2015). Persepsi Knowledge Management sebagai Sistem Pengendalian Internal dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Entitas Akuntansi di Indonesia. *Symposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Ferwiasa, Dhina dan Abu Talkah. (2013). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

- Tulungagung. *Jurnal Ilmu Manajemen, REVITALISASI*, Vol.2, No.3, hal. 105-115.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. (2008). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal SNA*. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2015). <http://kbbi.web.id/paham>
- Mada, Sarifudin., Kalangi, L., Gamaliel, H. (2017). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo*. Goodwill Vol. 8 No. 2. 2017
- Mardiasmo. (2006). Pewujud Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntabilitas Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2, No. 1
- Mandey, Billy. (2015). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah
- Ningsih. Nining Ade; Indar; Amran Razak. (2011). Analisis Hubungan Prinsip-Prinsip Good Governance dengan Kinerja Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur. *Thesis*. Universitas
- Hasanuddin. Makassar. (www.unhas.ac.id)
- Peraturan Bupati Banyumas No.15. 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang edoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rahmawati, Hesti Irna. (2015). *Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman)*. The 2nd University Research Coloquium 2015. ISSN 2407-9189
- Robin, Stephen dan Judge A. Timothy. (2015). *Perilaku Organisasi*, Edisi 16. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Sari, N. P. Y. M. M., I Made Pradana Adiputra, Edy Sujana. (2013). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi SI)*, 2(1).
- Sudiaranti, Ni Made, dkk. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi

- Pemerintah Serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*. Manado
- Suharto, Agus A. (2012). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmu Manajemen, REVITALISASI*, Vol. 1 Nomor 3 , hal. 67-79.
- Soekidjo Notoatmodjo. (2007). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sutaryo & Jakawinarna. (2013). Karakteristik DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dukungan Empiris dari Prespektif Teori Keagenan. *Simposium Nasional Akuntansi XVI*. Manado.
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Wahyuni, Putu Sri, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Nyoman Trisna Herawati. (2014). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Badung). *e-Journal SI Ak. Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 2 No. 1.
- Widyatama, Arif., Novita, L., Diarespati. 2017. *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 02, No. 02 Tahun 2017, Hal. 1-20.
- www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/05/06/nxxra0-dana-desa-di-banyumas-meningkat-menjadi-rp-89-m
- (www.banyumaskab.go.id/read/15722/kebijakan-alokasi-dana-desa-add-dan-penguatan-otonomi-desa).

